

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permintaan bahan baku pada industri kayu terus meningkat, namun sejak pemerintahan memberlakukan *moratorium atau jeda balak*, bahan baku kayu dari kawasan hutan justru berkurang (Darusman & Hardjanto 2006). Permintaan kayu di Indonesia, khususnya Jawa, mulai menjadikan kayu yang berasal dari hutan rakyat sebagai alternatif bahan baku. Hutan rakyat memberikan kontribusi penting pada industri kayu di Pulau Jawa. Kayu yang berasal dari hutan rakyat memenuhi 70 % konsumsi kayu pertukangan dan 90 % kayu bakar di Pulau Jawa dipenuhi dari kayu hutan rakyat. Hasil penelitian tersebut ternyata mengejutkan banyak pihak yang terkecimpungan di dunia kehutanan. Sejak saat itu kayu rakyat tersebut menjadi bahan yang tidak ditinggalkan dalam berbagai macam pembicaraan mengenai konsumsi kayu (Hardjanto 2003).

Hutan rakyat di Pulau Jawa dewasa ini telah menjadi sebuah fenomena sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang sangat luar biasa. Data Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa luas total hutan rakyat di seluruh Indonesia mencapai 3.589.343 Ha, dimana 2.799.181 Ha atau 78 % diantaranya terdapat di Pulau Jawa. Menurut Balai KPH Yogyakarta tahun 2014, kawasan hutan Balai KPH Yogyakarta seluas 15.724 Ha yang tersebar di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo. Posisi kawasan hutan pada Balai KPH Yogyakarta dalam kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara prinsip diakui dan dihormati keberadaannya. Posisi kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tampak jelas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo. Luas hutan wilayah KPH Yogyakarta di Kabupaten Bantul 1.041 Ha

terbagi dalam dua RPH yaitu RPH Dlingo dan RPH Mangunan, yang semuanya termasuk dalam wilayah BDH Kulon Progo - Bantul. Kawasan hutan ini merupakan Hutan Lindung dan berada pada wilayah Kecamatan Dlingo. Salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengelola hutan rakyat yaitu Kabupaten Bantul.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yogyakarta pada tahun 2019, luas hutan rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 78.400 Ha, yang terdiri dari 4 provinsi yaitu Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Luas hutan rakyat Gunungkidul yaitu 44.110 Ha, luas hutan rakyat Kulon Progo yaitu 20.795 Ha, luas hutan rakyat Sleman yaitu 4.898 Ha, dan luas hutan rakyat Bantul yaitu 8.595 Ha yang terbagi 14 kecamatan dan 3 kecamatan tidak memiliki kawasan hutan rakyat. Hutan rakyat di Kabupaten Bantul terdapat 14 kecamatan, dan yang terdapat di Kecamatan Dlingo memiliki luas sebesar 5.793,98 Ha. Kecamatan Dlingo memiliki lembaga Unit Manajemen Hutan Rakyat yang dikenal JASEMA. Usaha hutan rakyat terus berkembang, namun juga menunjukkan penyusutan disisi lain berupa penurunan kelas diameter pada permintaan pasar serta matinya industri pengolahan karena kekurangan bahan baku (Hardjanto 2003).

Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia, dan dikelola secara tradisional oleh pemiliknya. (Irundu, dkk 2018), menyatakan hutan rakyat dewasa ini banyak dikelola tanpa memperhatikan teknik dan sistem silvikultur mayoritas hutan rakyat dikelola dengan sistem monokultur dan campuran. Masyarakat pedesaan dapat menanam pohon kayu-kayuan di sawah atau menanam pohon kayu-kayuan secara monokultur di hutan rakyat dan juga dapat mengelola hutan rakyat untuk menghasilkan satu jenis produk atau beragam produk, yang dikenal sebagai hasil pertanian dan hasil hutan. Dalam kondisi yang demikian, semua hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu secara potensial dapat diusahakan di hutan rakyat (Puspitojati, dkk, 2014).

Pengelolaan hutan rakyat, diakui sebagai salah satu solusi permasalahan kehutanan dalam menyediakan kayu. Namun dalam pengelolaan hutan rakyat masih memiliki beberapa kendala yang sesuai dengan pernyataan (Rizal, dkk 2012), yang menyatakan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala dalam optimalisasi pemanfaatan lahan hutan rakyat, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknik budidaya seperti pengaturan pola tanam, jarak tanam dan pemilihan jenis tanaman. Pengelolaan hutan rakyat kedepannya semakin berkembang sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian yang mendukung sistem pengelolaan hutan rakyat tersebut serta memberikan pemahaman dalam menanggulangi kendala pemanfaatan hutan rakyat tersebut.

Semakin bertambahnya pertumbuhan industri pengolahan kayu rakyat yang tidak sebanding dengan ketersediaan kayu rakyat yang berkelanjutan. Kecenderungan tersebut juga menggambarkan pihak industri yang tidak memperhatikan kelestarian usaha dan ketersediaan bahan baku dari hutan rakyat. Budidaya hutan rakyat yang dilakukan secara sederhana dari segi sistem silvikultur dan manajemen menjadi ancaman bagi kelestarian hutan rakyat, sehingga perlu diketahui potensi dan ketersediaan kayu rakyat agar dapat menilai kelestarian usaha hutan rakyat kedepannya. Di sisi lain perlu juga diketahui bagaimana sumbangan hutan rakyat sebagai mata pencaharian yang dimanfaatkan untuk memnuhi kebutuhan kehidupan petani. Hal ini penting bagi rumah tangga petani hutan rakyat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan hutan rakyat.

B. Rumusan Masalah

Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Salah satu hasil hutan yang dimiliki di daerah tersebut adalah jati, sengon, mahoni atau bisa disebut dengan istilah JASEMA, tetapi ada juga tanaman lainnya seperti akasia, sonokeling dan gmelina. Bagaimana masyarakat mengelola hutan rakyat di Desa Terong, yang terdiri dari aspek

perencanaan, organisasi, pemeliharaan, pemasaran dan keseluruhan sistem pengelolaan di hutan rakyat tersebut perlu diketahui untuk dapat mengembangkan sistem pengelolaan pada masa yang akan datang. Hutan rakyat memiliki kontribusi yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di beberapa daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pengetahuan mengenai potensi dan pola pengelolaan hutan rakyat khususnya di Desa Terong, Dusun Pancuran, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jenis-jenis tanaman yang berada di lahan masyarakat dan potensi jenis tanaman penghasil kayu, tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*), dan tanaman pangan.
2. Mengidentifikasi karakteristik pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan meliputi : perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan hutan rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi jenis-jenis tanaman yang berada di lahan masyarakat dan potensi jenis tanaman penghasil kayu, tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*)/ tanaman buah dan tanaman pangan.
2. Memberikan informasi mengenai karakteristik budidaya hutan rakyat, potensi kepemilikan dan kerapatan pohon.
3. Menjadi data dasar untuk mengembangkan berbagai penelitian lain tentang hutan rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan monitoring serta pembuatan kebijakan dalam kegiatan hutan rakyat.